

FROM CONVENTIONAL FINANCE TO DIGITAL FINANCE: ANALISIS KONTRIBUSI FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA SELAMA PANDEMI

ABSTRACT

The COVID19 pandemic that occurred in Indonesia has increasingly encouraged the emergence of the phenomenon of the transformation of financial transactions towards digital, such as the use of financial technology. This phenomenon is thought to be able to increase the ease and speed of public consumption and investment activities which are the key to economic development. The purpose of this study was to analyze the contribution of financial technology in the form of peer-to-peer lending, crowdfunding, e-money, debit cards, and credit cards to Sumatra's economic growth during the COVID19 pandemic. Panel data consisting of a combination of cross-section data from 10 provinces in Sumatra and 10 time-series data with a quarterly period from the first quarter of 2020 to the second quarter of 2022 was evaluated to obtain the research objectives. The data were analyzed using panel data regression with the selected model, namely the fixed effect model. The results showed that three of the five types of *fintech* tested, namely peer-to-peer lending, e-money, and debit cards, had a positive and significant impact on economic growth in Sumatra during the pandemic. If there is an increase in transactions of 1% in *fintech* p2p lending, e-money, and debit cards, then each will contribute 0.402%, 0.613%, and 0.105% to economic growth in Sumatra during the pandemic. Meanwhile, *fintech* crowdfunding and credit cards have a positive but not significant effect on economic growth in Sumatra during the pandemic.

Keywords: *Economic growth; Financial technology; COVID19 pandemic*

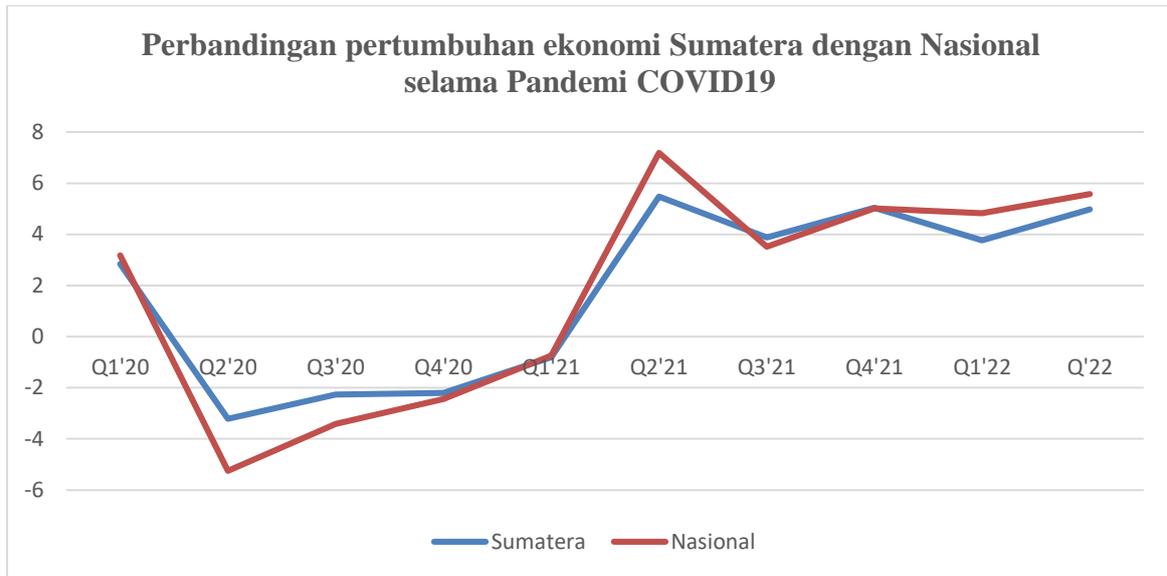
I. PENDAHULUAN

Sejak pertama kali menginfeksi Indonesia pada awal tahun 2020 lalu, Pandemi COVID19 telah berhasil mengubah berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun pandemi juga membuat perekonomian jatuh. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus (Hanoatubun, 2020).

Seluruh perilaku masyarakat, mulai dari aktivitas belajar, bertransaksi, melakukan konsumsi dan produksi dibatasi selama pandemi. Jika semula, semua aktivitas dapat dikerjakan secara langsung dan melibatkan kontak fisik, namun sebagai akibat dari adanya pandemi, semua kegiatan dialihkan ke sistem *online* karena adanya kebijakan pembatasan sosial seperti kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) yang masif diterapkan. Sebagai akibat dari adanya kebijakan ini, produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa berkurang. Selain itu, pandemi juga mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat menurun sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Yamali & Putri, 2020).

Sama halnya dengan wilayah lain di Indonesia, Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah yang menerima dampak negatif pandemi yang cukup signifikan. Sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, selama ini Sumatera dikenal sebagai salah satu wilayah yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 21,32% dan berada pada posisi kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa (59%). Namun, setelah pandemi menyerang Indonesia, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera langsung berkontraksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), rata-rata pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama satu tahun terjadinya pandemi turun sebesar 1,25% year on year (yoy). Meskipun demikian, saat ini perekonomian di Sumatera mulai menunjukkan pulih yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi di Indonesia.

Grafik 1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Sumatera dengan nasional selama Pandemi COVID19



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022), diolah

Berdasarkan data pada Grafik 1, terlihat bahwa PDRB di wilayah Sumatera dan nasional secara keseluruhan mulai mengalami penurunan pada Triwulan II 2020. Hal ini disebabkan karena pada periode ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus. Pada periode ini, pertumbuhan PDRB Sumatera turun sebesar 3,218%. Tren penurunan ini dilanjutkan pada periode berikutnya sampai pada triwulan I tahun 2021 dengan mencatatkan angka penurunan masing-masing sebesar 2,272% (triwulan III 2020), 2,2% (triwulan IV 2020), dan 0,807% (triwulan I 2021). Setelah periode ini, tanda-tanda pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera mulai terlihat dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tercatat positif. Hal ini tidak terlepas pada kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat, karena pada awal tahun 2021 pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi skala nasional.

Dua hal dari sektor perekonomian yang paling terdampak pandemi yaitu konsumsi masyarakat yang menurun dan produktivitas perusahaan yang berkurang (Widiastuti & Silfiana, 2021). Selama pandemi, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas konsumsi dan pengeluaran karena adanya kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan. Jika sebelum pandemi, masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktivitas konsumsi dan pengeluaran seperti berbelanja, membeli makanan dan minuman, atau menggunakan jasa transportasi, namun selama pandemi aktivitas yang dilakukan secara langsung tersebut secara otomatis berkurang. Hal ini berdampak negatif pada sisi produksi perusahaan. Karena daya beli

masyarakat menurun selama pandemi, perusahaan memilih untuk mengurangi produktivitas usahanya. Akibatnya, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan banyak yang sampai gulung tikar untuk menekan biaya produksi, khususnya biaya tenaga kerja karena terbatasnya permodalan (Widiastuti & Silfiana, 2021).

Di situasi yang sulit dan serba terbatas yang saat ini sedang terjadi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya internet dalam bidang keuangan menjadi sangat penting dan urgen. Digitalisasi yang saat ini berkembang pesat juga merambah dalam sektor keuangan yang ditandai dengan munculnya fenomena *financial technology (fintech)*. *Fintech* menjadi instrumen keuangan baru berbasis teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya di kondisi ekonomi yang sulit karena pandemi (Alber & Dabour, 2020).

Perkembangan *fintech* di Indonesia terbilang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penetrasi pengguna internet di Indonesia. Selain itu, kondisi pandemi yang sedang berlangsung juga turut mendukung industri *fintech* karena munculnya fenomena transformasi transaksi keuangan ke arah digital. Berdasarkan United Overseas Bank (UOB), PwC, Singapore *Fintech Association (SFA)* per September 2021, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah *fintech* di Indonesia tercatat sebanyak 440 perusahaan. Angka ini kemudian meningkat sebesar 78,41% menjadi 785 perusahaan pada periode September 2021. Indonesia juga tercatat sebagai pemilik perusahaan *fintech* terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Singapura (1350).

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Perusahaan *Fintech* di Indonesia (2017-2021)



Sumber: (UOB, PwC, & SFA, 2021), diolah

Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi, permintaan agregat dalam sistem perekonomian tertutup sangat dipengaruhi oleh faktor konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi (Terra et al., 2021). Faktor-faktor tersebut dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan total di situasi yang cenderung normal. Namun, ketika situasi berubah menjadi abnormal seperti pandemi di mana aktivitas masyarakat dibatasi, maka aktivitas konsumsi masyarakat, investasi dan pembiayaan menjadi melemah sehingga pada saat itulah peran *fintech* dibutuhkan (Alber & Dabour, 2020). Dengan berkembangnya *fintech*, maka aktivitas konsumsi, investasi dan pembiayaan menjadi lebih mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh sekat karena semua transaksi keuangan dilakukan berbasis teknologi (Sadigov et al., 2020). Dengan demikian, secara teori, dengan semakin berkembangnya *fintech* dalam aktivitas konsumsi, investasi, atau pembiayaan dan aktivitas ekonomi lainnya maka seharusnya pendapatan agregat akan meningkat yang pada akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori ini dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya yang telah menguji dampak perkembangan *fintech* terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian Fisabilillah & Hanifa (2021); Maulana & Wiharno (2022); Retnosari et al., (2020); Sihombing (2021); Ratna (2021); Song & Appiah-Otoo (2022); Narayan (2014); Deng & Cheng (2019); Khiewngamdee & Yan (2019); dan Omodero (2021). Sebagian besar penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa *fintech* berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun saat ini, studi yang meneliti tentang pengaruh *fintech* terhadap pertumbuhan ekonomi terus berkembang, namun sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada salah satu jenis *fintech* saja seperti *peer to peer (p2p) lending* (Fisabilillah & Hanifa, 2021; Retnosari et al., 2020; Maulana & Wiharno, 2022; dan Sihombing, 2021), atau *fintech* dengan jenis *e-payment* (Ratna, 2021; Khiewngamdee & Yan, 2019; dan Omodero, 2021). Artinya, saat ini belum banyak penelitian yang mengeksplorasi berbagai jenis *fintech* yang berkembang secara keseluruhan dalam satu penelitian. Padahal, jenis *fintech* yang berkembang khususnya di Indonesia tidak hanya *p2p lending* yang mengakomodasi layanan pembiayaan atau *e-money*, *debit card* dan *credit card* yang memberikan kemudahan pembayaran saja, namun *fintech* dengan jenis lainnya seperti *crowdfunding* yang bergerak dalam bidang layanan investasi juga berkembang pesat. *Fintech* jenis inilah yang belum dieksplor pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dengan melihat semakin berkembangnya *fintech* yang pesat, khususnya di masa Pandemi COVID19 dan dengan ditemukannya kesenjangan (*gap*) penelitian yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak perkembangan

fintech (*p2p lending*, *e-money*, *credit card*, *debit card* dan *crowdfunding*) terhadap pertumbuhan ekonomi selama Pandemi COVID19. Studi ini difokuskan hanya pada wilayah Sumatera yaitu 10 provinsi di pulau tersebut dengan pertimbangan bahwa wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID19. Sementara itu, periode penelitian dilakukan selama 2,5 tahun dengan menganalisis data triwulan sejak COVID19 muncul yaitu triwulan I 2020 hingga triwulan II 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Rosser, 2013). Dalam Teori Pertumbuhan Keynes, situasi perekonomian di suatu wilayah sangat ditentukan oleh permintaan agregat yaitu seluruh pengeluaran yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Jika permintaan agregat melebihi jumlah penawaran agregat (seluruh *output* yang dihasilkan), maka yang akan terjadi harga barang akan naik karena adanya situasi kekurangan produksi. Sebaliknya, jika penawaran agregat lebih besar dari pada permintaan agregat maka akan terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan harga barang dan jasa turun (Terra et al., 2021).

Dalam sistem perekonomian tertutup, Teori Pertumbuhan Keynes mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor konsumsi yang dilakukan masyarakat (rumah tangga), investasi oleh perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, Keynes mengembangkan model persamaan makro ekonomi yaitu sebagai berikut:

$$Y = C + I + G$$

Di mana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

Model persamaan di atas menjelaskan bahwa jika terjadi kenaikan pada aktivitas konsumsi rumah tangga, investasi oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, maka akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa yang menjadi indikator utama dalam pertumbuhan ekonomi, begitupula sebaliknya.

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah dengan menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam area regional atau wilayah tertentu dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah

seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) pada periode tertentu. Jika terjadi peningkatan dari produksi barang dan jasa di suatu wilayah (PDRB), maka menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang bagus di wilayah tersebut (Mankiw, 2020)

PDRB dapat disajikan dalam dua cara yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2022). PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) menerangkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun berjalan. Penyajian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan struktur perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) menjelaskan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga barang yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Menurut BPS, PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit produksi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Unit produksi ini terdiri dari 9 sektor lapangan usaha yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, industri listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. PDRB berdasarkan pengeluaran dihitung dari jumlah semua komponen pengeluaran yang telah dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) perusahaan, pengeluaran pemerintah, pembentukan stok dan ekspor bersih. Sementara itu, PDRB dengan pendekatan pendapatan diperoleh dari jumlah balas jasa yang diterima dalam suatu proses produksi seperti gaji, upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan di suatu wilayah pada periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.2 Financial Technology

Narastri (2020) mendefinisikan *financial technology (fintech)* dengan sederhana yaitu suatu inovasi teknologi yang muncul dan berkembang dalam industri keuangan. Pratama (2021) menjelaskan bahwa inti dari *fintech* adalah adanya pengadopsian jaringan komputer dan internet yang diterapkan pada layanan keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, menjelaskan *financial technology* dengan lebih detail yaitu:

“Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”.

Dari tiga pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan sebuah layanan yang menyediakan produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utamanya.

Hadirnya *fintech* di industri keuangan disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang ditandai dengan hadirnya internet. Munculnya *fintech* menyebabkan perubahan gaya hidup bertransaksi masyarakat menjadi serba cepat dan serba mudah (Fisabilillah & Hanifa, 2021). Rahardjo et al. (2019) menjelaskan bahwa dengan adanya *fintech*, masyarakat khususnya UMKM menjadi lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan keuangan. Dalam hal ini, *fintech* dapat membantu transaksi keuangan masyarakat seperti pinjam meminjam, transaksi pembayaran dan investasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Seluruh transaksi keuangan masyarakat pada sistem *fintech* dilakukan dengan berbantuan teknologi digital sehingga masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi keuangan. Jika dahulu, dalam melakukan proses peminjaman uang di bank, atau melakukan transaksi pembayaran dilakukan secara langsung, maka dengan hadirnya *fintech*, masyarakat cukup memanfaatkan gawai yang tersambung ke perangkat internet untuk melakukan transaksi keuangan tersebut, tanpa harus datang langsung ke bank atau bertemu secara langsung (Basuki & Husein, 2018). Simorangkir et al. (2021) menyebut ada 3 jenis layanan *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia:

1. *Peer to peer (p2p) lending*

Secara sederhana, *peer to peer (p2p) lending* merupakan jenis *fintech* yang menyediakan layanan peminjaman uang secara *online*. *Fintech* jenis ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian peminjaman atau kredit yang difasilitasi oleh platform (Fisabilillah & Hanifa, 2021). Dengan adanya *p2p lending*, masyarakat yang membutuhkan akses permodalan untuk membiayai usahanya tidak perlu lagi untuk datang ke lembaga keuangan seperti bank. Mereka cukup memanfaatkan gawai yang terakses internet, maka transaksi peminjaman uang dapat dilakukan.

2. *Equity crowdfunding*

Equity crowdfunding merupakan jenis *fintech* yang menyediakan layanan penggalangan dana untuk membiayai suatu proyek (misalnya usaha tertentu atau kegiatan sosial) melalui platform digital (Moritz & Block, 2016). Dengan *fintech* ini, masyarakat juga dapat berinvestasi sosial untuk mengembangkan atau membiayai sebuah usaha dengan lebih cepat karena berbasis internet. *Fintech* jenis ini memiliki kemiripan dengan *p2p lending*, namun yang menjadi perbedaan pada *fintech equity crowdfunding*, investor diposisikan sebagai pemilik usaha.

3. *Digital Payment System*

Fintech dengan jenis *digital payment system* memungkinkan masyarakat untuk melakukan

transaksi pembayaran secara online tanpa melalui bank atau melakukan transaksi secara langsung (Andaiyani & Tarmizi, 2020). Dengan adanya *fintech* ini, masyarakat dapat membayar tagihan listrik, pulsa, pembelian barang online dan lain-lain hanya dengan melalui aplikasi. Contoh dari aplikasi *digital payment system* adalah *e-money*, *credit card*, atau *debit card*.

2.3 Hubungan *Financial Technology* dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Teori Pertumbuhan Keynes, dua dari tiga faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada sistem perekonomian tertutup di suatu wilayah adalah peningkatan aktivitas konsumsi dan investasi (Terra et al., 2021). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini berarti apabila jumlah konsumsi meningkat, maka menandakan terjadinya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Kondisi ini memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa untuk memenuhi peningkatan permintaan barang dan jasa yang ada. Peningkatan produksi barang dan jasa inilah yang pada akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sudirman & Alhudhori, 2018).

Hal yang sama juga berlaku pada aktivitas investasi. Ketika nilai investasi di suatu wilayah meningkat, maka bertanda telah terjadi peningkatan penanaman atau pembentukan modal. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena dengan adanya modal, perusahaan dapat membiayai biaya produksi secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan penanaman modal di suatu wilayah, maka dapat berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan agregat (Sudirman & Alhudhori, 2018).

Di era digital seperti yang saat ini masif terjadi, aktivitas konsumsi dan investasi tidak hanya dilakukan secara *face to face* atau langsung, namun juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi finansial (*fintech*). Fenomena *fintech* ini semakin berkembang pesat ketika pandemi COVID19 terjadi. Hal ini dikarenakan ketika pandemi COVID19 menyerang Indonesia, masyarakat dipaksa untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah. Hal ini berakibat pada bertransformasinya kegiatan konsumsi dan investasi ke arah digital melalui *fintech*. Dalam kegiatan berkonsumsi selama masa pandemi, masyarakat cenderung menggunakan teknologi *fintech* seperti *e-money*, kartu debit, atau kartu kredit untuk melakukan transaksi pembayaran karena prosesnya yang lebih mudah dan cepat (Alber & Dabour, 2020). Sementara itu, kegiatan investasi selama pandemi juga beralih ke sistem online yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan *fintech peer to peer lending* atau *fintech crowdfunding* (Fisabilillah & Hanifa, 2021).

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menganalisis dampak hadirnya *fintech* terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan baik di negara Indonesia, maupun di luar negara Indonesia. Sebagai

contoh, penelitian Fisabilillah & Hanifa (2021); Maulana & Wiharno (2022); Retnosari et al., (2020); Sihombing (2021); Ratna (2021); Song & Appiah-Otoo (2022); Narayan (2014); Deng & Cheng (2019); Khiewngamdee & Yan (2019); dan Omodero (2021). Hampir semua penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa *fintech* mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Penelitian Fisabilillah & Hanifa (2021) menemukan bahwa *fintech* dengan jenis *peer to peer lending* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 68,18% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama pandemi. Maulana & Wiharno (2022) menyimpulkan bahwa hadirnya *fintech peer to peer lending* di Indonesia memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan besar pengaruh mencapai 74,6%. Penelitian lainnya dari Sihombing (2021) menjelaskan bahwa *fintech* yang diukur dengan banyaknya jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia mampu berkontribusi positif dan signifikan terhadap nilai investasi dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ratna (2021) menganalisis dampak transaksi pembayaran yang dilakukan secara non tunai dengan *fintech* di Indonesia selama periode 2010-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit/ATM, kartu ATM, dan e-money berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian Narayan (2014) menyimpulkan bahwa hadirnya perusahaan *fintech* di Indonesia berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil ini juga diperkuat di dalam penelitian (Retnosari et al., 2020).

Penelitian lainnya di Negara China dilakukan oleh Song & Appiah-Otoo (2022) yang menemukan bahwa setiap peningkatan transaksi *fintech* sebesar 10% di negara China, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut sebesar 8%. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Deng & Cheng (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *fintech peer to peer lending* dengan pertumbuhan ekonomi pada 31 provinsi di China di mana provinsi di wilayah timur dan tengah memiliki dampak yang lebih signifikan dari hadirnya *fintech* dibandingkan provinsi di wilayah barat.

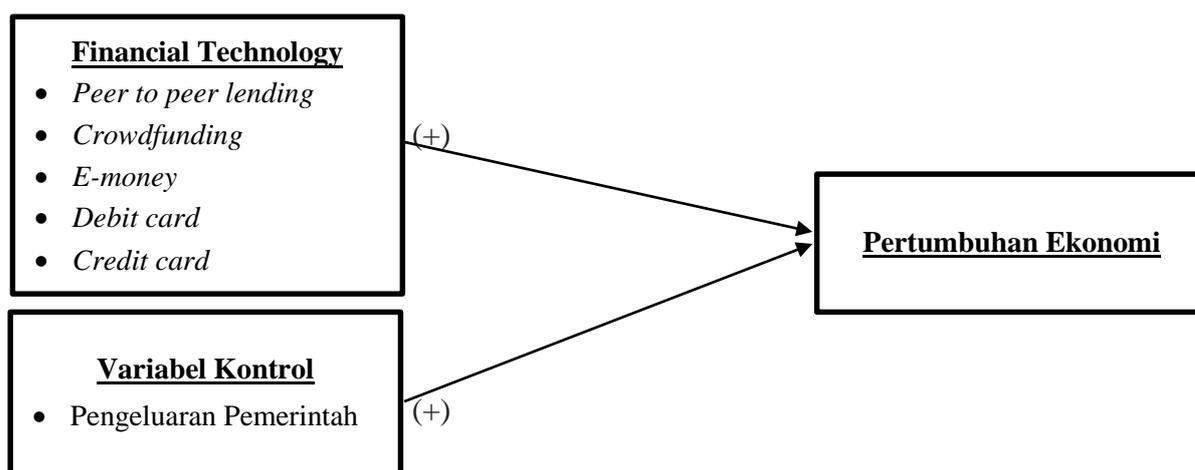
Khiewngamdee & Yan (2019) menginvestigasi dampak berkembangnya *fintech e-money* terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara APEC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi finansial dalam sistem *e-payment* mampu mendorong perkembangan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan pendapatan masyarakat. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Omodero, (2021) yang meneliti dampak e-payment berupa pembayaran menggunakan ATM, e-

money, website, dan point of sale (POS) terminal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh komponen *e-payment*, kecuali *point of sale* (POS) terminal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan fenomena berkembangnya *fintech* di masa pandemi COVID19 dan dengan merujuk teori yang ada, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang bertujuan untuk menguji pengaruh aktivitas konsumsi dan investasi masyarakat selama pandemi yang dilakukan dengan menggunakan *fintech* e-money (Omodero, 2021; Ratna, 2021; dan Khiewngamdee & Yan, 2019), *debit card* (Ratna, 2021 dan Omodero, 2021), *credit card* (Ratna, 2021 dan Song & Appiah-Otoo, 2022), *peer to peer lending* (Fisabilillah & Hanifa, 2021 dan Maulana & Wiharno, 2022) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dampak *fintech crowdfunding* terhadap pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Hal ini karena studi mengenai *fintech crowdfunding* belum sepenuhnya dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu, padahal *fintech* jenis ini juga berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Untuk memperkuat hasil penelitian, studi ini juga menggunakan variabel kontrol berupa pengeluaran pemerintah dan aktivitas ekspor dan impor sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Model Keynes dan hasil penelitian sebelumnya yaitu Ichvani & Sasana (2019). Dengan demikian, kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang tersaji dalam Gambar 1, maka penelitian ini mengembangkan lima hipotesis sebagai berikut:

1. *Fintech peer to peer lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.
2. *Fintech crowdfunding* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.
3. *Fintech e-money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.
4. *Fintech debit card* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.
5. *Fintech credit card* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan berupa angka-angka yang diolah dengan menggunakan metode kuantifikasi dan prosedur statistik sehingga menghasilkan suatu temuan. Sementara itu, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kausal yang diartikan sebagai pendekatan sebab akibat dari hubungan antar variabel. Penelitian ini menguji dampak perkembangan *fintech* (*p2p lending, e-money, credit card, debit card, dan crowdfunding*) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19.

3.2 Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada 10 provinsi di wilayah Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Rentang waktu penelitian dilakukan selama 2,5 tahun dengan periode triwulan (10 triwulan) dari triwulan I 2020 hingga triwulan II 2022. Dalam hal ini, artinya terdapat 100 data panel yang dianalisis yang berasal dari 10 provinsi sebagai data *cross section* dan 10 periode triwulan sebagai data *time series*.

3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang telah diunduh kemudian ditabulasi dan dihitung dengan menggunakan *microsoft excell* sesuai dengan pengukuran variabel yang digunakan. Sehingga, didapatkan data berupa nilai atau angka yang dapat dianalisis lebih lanjut.

3.4 Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis satu variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi, lima variabel independen berupa *fintech* (*p2p lending*, *e-money*, *credit card*, *debit card*, dan *crowdfunding*) serta satu variabel kontrol berupa pengeluaran pemerintah. Seluruh variabel penelitian dijelaskan dan diukur melalui Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel (Simbol)	Pengukuran	Sumber data
Variabel Dependent		
Produk Domestik Regional Bruto [LOG(PDRB ADHK)]	Nominal (Rupiah) - Logaritma natural dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berdasarkan pengeluaran selama tiga bulan	Badan Pusat Statistik
Variabel Independent		
<i>Financial technology</i>		
<i>P2p lending</i> [LOG(P2PLENDING)]	Nominal (Rupiah)- Logaritma natural dari total nilai transaksi pembiayaan yang telah disalurkan dari <i>fintech p2p lending</i> selama tiga bulan	Otoritas Jasa Keuangan
<i>Crowdfunding</i> [LOG(CROWDFUNDING)]	Nominal (Unit)- Logaritma natural dari total transaksi pembayaran dengan menggunakan <i>crowdfunding</i> selama tiga bulan	Otoritas Jasa Keuangan
<i>E-money</i> [LOG(EMONEY)]	Nominal (Rupiah)- Logaritma natural dari total nilai transaksi investasi yang telah disalurkan dari <i>e-money</i> selama tiga bulan	Bank Indonesia
<i>Debit Card</i> [LOG(DEBITCARD)]	Nominal (Rupiah) – Logaritma natural dari total nilai transaksi kartu debit selama tiga bulan	Bank Indonesia
<i>Credit Card</i> [LOG(CREDITCARD)]	Nominal (Rupiah) - Logaritma natural dari jumlah transaksi kartu kredit selama tiga bulan	Bank Indonesia
Variabel Kontrol		
Pengeluaran pemerintah [LOG(KONSUMSIPEM)]	Nominal (Rupiah) - Logaritma natural dari total pengeluaran pemerintah selama tiga bulan	Badan Pusat Statistik

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Persamaan Regresi Data Panel

Regresi data panel mengenal 3 bentuk model persamaan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Persamaan regresi dengan *common effect model* dan *fixed effect model* sama-sama menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS) dalam mengestimasi model, sementara *random effect model* menggunakan prinsip *general least square* (GLS).

3.5.1.1 Persamaan regresi common effect model (CEM)

Menuurt Sriyana (2015), CEM diasumsikan bahwa intercept dan slope pada unit cross section dan time series adalah sama. Bentuk persamaan regresi data panel dengan model common effect yaitu:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{ji,t} + e_{i,t} \quad (1)$$

Di mana: Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, β_0 adalah intrecept model atau

konstanta, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$ adalah slope atau koefisien regresi, t adalah jumlah periode waktu $t = 1, 2, \dots, n$, i adalah unit wilayah, $i = 1, 2, \dots, p$, e adalah nilai error.

3.5.1.2 Persamaan regresi fixed effect model (FEM)

Pangestika (2017) berpendapat bahwa FEM diasumsikan bahwa koefisien slope bernilai konstan tapi intercept bersifat tidak konstan. Bentuk umum dari persamaan regresi data panel dengan model FEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \beta_{0i,t} + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{ji,t} + e_{i,t} \quad (2)$$

3.5.1.3 Persamaan regresi random effect model (REM)

Nachrowi & Usman (2006) mengutarakan bahwa pada model regresi dengan bentuk REM, perbedaan karakteristik unit dan periode waktu diakomodasikan pada *error* atau residual dari model. Sehingga dalam hal ini, dua komponen yang berkontribusi dalam pembentukan error yaitu unit dan periode waktu perlu diurai menjadi *error* gabungan dan *error* gabungan waktu. Berikut adalah bentuk umum dari persamaan regresi data panel dengan model REM.

$$Y_{i,t} = \beta_{0i,t} + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{ji,t} + (\mu_{i,t} + e_{i,t}) \quad (3)$$

3.5.2 Tahapan Analisis Data

3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberi gambaran pada data variabel secara lebih detail. Pada penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menjelaskan nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum data pada masing-masing variabel di 10 provinsi di Sumatera selama periode waktu penelitian.

3.5.2.2 Penentuan Model Estimasi

Sebelum dilakukan pengujian regresi, analisis regresi pada data panel sebelumnya harus memilih model dengan metode mana yang paling tepat untuk diterapkan. Dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam model persamaan regresi data panel terdapat tiga model estimasi yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Untuk memilih model estimasi mana yang paling tepat diterapkan dalam regresi data panel terdapat tiga metode atau pendekatan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

3.5.2.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang tepat di antara CEM atau FEM. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probability pada kolom Cross-section Chi-square menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM daripada CEM sehingga harus dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Hausman Test. Sementara itu, jika nilai probability menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah CEM dan

dapat langsung untuk melakukan Uji Lagrange Multiplier, tanpa perlu melakukan Uji Hausman.

3.5.2.2.2 Uji Hausman

Hausman Test bertujuan untuk memilih model yang tepat di antara metode FEM atau REM. Apabila nilai *probability* menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai *probability* menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah REM dan harus dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Uji Lagrange Multiplier.

3.5.2.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Pengujian dalam memilih model yang tepat yang terakhir adalah Lagrange Multiplier Test. Uji ini bermaksud untuk memilih metode yang tepat di antara CEM atau REM dalam model regresi. Apabila nilai *breusch-pagan* pada kolom *cross-section* kurang dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah REM daripada CEM, begitu sebaliknya.

3.5.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi, untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten, maka harus dilakukan uji prasyarat yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Pada penelitian ini, uji asumsi normalitas dilakukan dengan Metode Jarque Bera di mana jika nilai $p \text{ value} > 0,05$, maka data berdistribusi normal, begitu sebaliknya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Metode Breusch Pagan Godfrey di mana jika nilai $p \text{ value } \chi^2 > 0,05$, maka tidak terdapat masalah pada asumsi heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan Metode Variance Inflation Factors (VIF). Jika nilai Centered VIF seluruh variabel independent kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi. Sementara itu, uji autokorelasi dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test di mana jika nilai $\text{Prob. } \chi^2 > 0,05$, maka data lolos dari asumsi autokorelasi.

3.5.2.4 Interpretasi Model Persamaan Regresi

Pada penelitian ini, interpretasi model persamaan regresi pada data panel terdiri dari 3 jenis yaitu interpretasi persamaan regresi yang terbentuk, uji kelayakan model (*goodness of fit model*) melalui uji T simultan dan uji koefisien determinasi serta pengujian hipotesis pada masing-masing variabel dengan uji t parsial.

3.5.2.4.1 Persamaan regresi yang terbentuk

Pada tahapan ini, interpretasi dilakukan dengan membentuk persamaan regresi data panel sesuai dengan model yang paling tepat.

3.5.2.4.2 Uji t parsial

Uji t parsial bertujuan untuk melihat pengaruh individu dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel terikat. Jika nilai p value pada masing-masing variabel dependen $< 0,05$, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, nilai coefficient pada model regresi digunakan untuk melihat arah dan besar pengaruh. Jika koefisien regresi bernilai positif, maka secara parsial, variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya.

3.5.2.4.3 Uji T Simultan

Uji T simultan bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) ketika diuji secara bersama-sama. Dasar pengambilan putusan adalah jika nilai prob F-Statistik bernilai $< 0,05$, maka secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan nilai Adjusted R^2 . Pada umumnya, nilai Adjusted R^2 berada pada rentang 0 sampai 1 di mana semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat, begitu sebaliknya.

IV. HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Deskripsi Data	2020				2021				2022	
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
PDRB ADHK*)	Rata-rata	85,69	80,34	84,96	85,77	87,14	90,62	93,72	96,43	98,37	104,35
	Total	856,95	803,43	849,61	857,66	871,44	906,21	937,18	964,33	983,71	1043,50
	Std.Deviasi	65,66	60,58	64,75	65,81	67,30	68,95	72,12	74,43	78,03	80,36
P2p Lending**)	Rata-rata	161,33	78,76	128,18	256,26	283,50	380,13	439,97	359,49	518,54	505,06
	Total	1613,35	787,57	1281,80	2562,59	2834,97	3801,30	4399,68	3594,91	5185,45	5050,63
	Std.Deviasi	124,55	74,01	116,71	198,55	201,64	268,49	317,36	261,92	370,51	349,99
E-Money***)	Rata-rata	1,88	1,88	1,86	2,13	3,27	4,34	3,35	3,80	4,88	6,09
	Total	18,80	18,78	18,60	21,31	32,67	43,44	33,50	38,02	48,78	60,91
	Std.Deviasi	1,65	1,70	1,61	1,84	2,89	4,99	2,46	2,74	3,67	3,96

Variabel	Deskripsi Data	2020				2021				2022	
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Crowd-funding**)	Rata-rata	0,00	0,00	0,55	0,13	0,25	0,17	0,11	0,90	0,00	0,35
	Total	0,00	0,00	5,46	1,34	2,46	1,65	1,05	9,00	0,00	3,53
	Std.Deviasi	0,00	0,00	1,29	0,43	0,56	0,52	0,33	2,85	0,00	0,82
Credit Card **)	Rata-rata	528,96	347,76	368,96	421,26	441,45	454,49	489,99	694,00	442,19	524,72
	Total	5289,59	3477,57	3689,61	4212,60	4414,54	4544,90	4899,94	6940,03	4421,94	5247,21
	Std.Deviasi	762,31	518,75	544,45	660,94	695,45	676,50	779,85	1272,54	713,56	832,23
Debit Card *)	Rata-rata	25,56	22,61	26,27	27,93	25,77	28,41	26,49	27,89	35,38	36,39
	Total	255,63	226,13	262,68	279,27	257,71	284,14	264,88	278,90	353,84	363,93
	Std.Deviasi	18,42	15,89	18,61	20,08	18,51	19,87	18,88	19,97	25,41	26,00
Kons. Pmrth *)	Rata-rata	5,11	6,63	6,79	8,43	4,74	7,32	7,08	8,85	4,80	6,78
	Total	51,09	66,26	67,93	84,34	47,41	73,18	70,76	88,46	48,05	67,84
	Std.Deviasi	3,31	3,73	3,47	3,54	3,21	3,87	3,92	3,90	3,19	3,72

Keterangan : *) dalam Rp Triliun, **) dalam Rp Milyar, ***) dalam Juta Transaksi, TW : Triwulan
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil analisis statistik deskriptif yang tertera pada Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap triwulan selama 2,5 tahun berlangsungnya pandemi COVID19, rata-rata dan total PDRB ADHK di wilayah Sumatera menunjukkan pola peningkatan, kecuali pada Triwulan II 2020. Periode Triwulan II 2020 merupakan periode pertama virus COVID19 menyerang Indonesia. Pada periode ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan wilayah secara intensif untuk mengurangi penyebaran virus. Hal ini berdampak pada melemahnya produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga menyebabkan penurunan pada PDRB. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa pada periode ini, PDRB di wilayah Sumatera menurun sebesar 6,25% dari triwulan sebelumnya. Namun, setelah itu, perekonomian di wilayah Sumatera mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit yang ditandai dengan peningkatan PDRB ADHK pada Triwulan III 2020 dari periode triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, apabila diamati, nilai PDRB ADHK di wilayah Sumatera pada periode Triwulan III 2020 masih lebih rendah (Rp 849,61 Triliun) dan hanya sedikit lebih tinggi pada Triwulan IV 2020 (Rp 857,66 Triliun) dibanding periode Triwulan I 2020 (Rp 856,95). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di wilayah Sumatera pada tahun pertama terjadinya COVID19 di Indonesia belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Setelah program vaksinasi dijalankan pemerintah pada awal tahun 2021, nilai PDRB ADHK di wilayah Sumatera selalu mengalami peningkatan setiap triwulan.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa nilai standar deviasi selalu memperlihatkan angka yang lebih rendah dari nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa data menyebar secara homogen atau tidak terdapat penyimpangan yang signifikan antara variansi dengan rata-ratanya. Meskipun demikian, tingkat disparitas pendapatan antar provinsi di Sumatera masih cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai total PDRB ADHK Provinsi Bengkulu yang

mendapat predikat terendah di Sumatera yaitu hanya sebesar Rp 17,91 triliun pada Periode Triwulan II 2020. Sementara itu, di bagian provinsi lainnya yaitu Provinsi Riau, nilai total PDRB ADHK telah mencapai Rp 247,2 triliun pada Triwulan II 2022 atau 14 kali lipat dari Provinsi Bengkulu dan merupakan nilai PDRB ADHK tertinggi di Sumatera.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata dan total transaksi *peer to peer lending* di wilayah Sumatera selama pandemi menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap triwulan, kecuali pada Triwulan II 2020. Jika diperhatikan, nilai total transaksi *fintech p2p lending* di Sumatera pada Triwulan I 2020 hanya sebesar Rp 1,613 Triliun, namun angka ini kemudian meningkat sampai hampir 5 kali lipat menjadi Rp 5,05 Triliun pada Triwulan II 2022. Peningkatan transaksi penyaluran peminjaman dan pembiayaan online di Sumatera yang pesat ini menunjukkan bahwa skema *fintech p2p lending* menjadi alternatif pembiayaan yang digemari oleh pelaku usaha di Sumatera dalam mendapatkan dana untuk biaya produksi, terlebih pada situasi ekonomi yang sulit karena pandemi.

Nilai standar deviasi transaksi pembiayaan *peer to peer lending* selalu menunjukkan angka lebih rendah dibanding nilai rata-ratanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak terdapat penyimpangan variansi yang signifikan dari nilai rata-ratanya. Meskipun demikian, terdapat beberapa provinsi dengan nilai transaksi penyaluran pembiayaan *p2p lending* yang masih rendah, misalnya Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar Rp 15,44 Milyar pada Triwulan II 2020. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, nilai transaksi pembiayaan *p2p lending* di Provinsi Bengkulu hanya 1,25% dari total penyaluran pembiayaan *p2p lending* di Sumatera Utara yang telah mencapai Rp 1,23 Triliun pada Triwulan II 2022. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di wilayah Sumatera masih terdapat kesenjangan transaksi penyaluran pembiayaan dengan *p2p lending* antar provinsi yang cukup besar.

Pola peningkatan juga ditunjukkan oleh total transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* selama pandemi di Sumatera. Pada Triwulan I 2020, jumlah transaksi *e-money* di Sumatera hanya 18,8 juta unit. Angka ini kemudian meningkat sebesar 324% menjadi 60,91 juta transaksi pada Triwulan II 2022. Peningkatan jumlah transaksi pada *e-money* di wilayah Sumatera mengindikasikan terjadinya transformasi pembayaran dari konvensional menuju digital selama pandemi. Selama pandemi, banyak masyarakat di Sumatera yang beralih ke pembayaran elektronik untuk memudahkan transaksi pembayaran, terlebih di situasi yang memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

Nilai standar deviasi pada jumlah transaksi *e-money* cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Hal tersebut mengartikan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan jumlah transaksi *e-money* di beberapa provinsi. Misalnya, Provinsi Bengkulu

memiliki jumlah transaksi e-money yang paling rendah di wilayah Sumatera yaitu hanya mencatatkan 259.758 transaksi e-money pada Triwulan II 2020, namun di provinsi lainnya, seperti Provinsi Lampung, jumlah transaksi e-money telah mencapai lebih dari 17 juta transaksi atau 66 kali lipat lebih tinggi dibanding Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, perkembangan jumlah nilai transaksi investasi dengan menggunakan platform *crowdfunding* terlihat belum signifikan seperti di Pulau Jawa. Bahkan, pada Triwulan I & II 2020 dan Triwulan I 2022 tercatat tidak ada transaksi investasi dengan menggunakan *crowdfunding* di wilayah Sumatera. Selain itu, ada 4 provinsi di wilayah Sumatera yang tidak mencatatkan transaksi investasi dengan *crowdfunding* selama pandemi yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Nilai transaksi investasi berbasis platform *crowdfunding* di wilayah Sumatera juga menunjukkan pola yang tidak konsisten dan cenderung naik turun.

Standar deviasi pada total nilai transaksi *crowdfunding* di Sumatera selama pandemi tercatat cenderung lebih tinggi dibanding nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa data menyebar secara heterogen dan terdapat perbedaan yang signifikan antara variansi dengan rata-ratanya. Perbedaan tersebut terlihat pada Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan nilai transaksi penyaluran investasi berbasis *crowdfunding* dengan angka yang cukup tinggi yaitu Rp 9 Milyar pada Triwulan IV 2021, sementara 4 provinsi lainnya (Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung) tidak mencatatkan transaksi penyaluran pembiayaan berbasis *fintech crowdfunding* selama pandemi.

Hasil deskripsi data menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari total nilai transaksi dengan menggunakan kartu kredit di wilayah Sumatera pada Triwulan II 2020. Pada Triwulan I 2020, total nilai transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tercatat sebesar Rp 5289,59 Triliun, namun angka ini kemudian menurun sebesar 34,26% menjadi hanya Rp 3477,57 Triliun pada Triwulan II 2020. Meskipun setelah periode ini, transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai menunjukkan peningkatan, namun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan I 2020, kecuali pada Triwulan IV 2021 yang mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 6940,03 Triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi COVID19 berdampak signifikan pada penurunan penggunaan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

Sementara itu, standar deviasi pada total nilai transaksi pembayaran dengan kartu kredit menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan adanya penyebaran data yang heterogen dan terdapat perbedaan yang signifikan antara variansi dan rata-ratanya. Perbedaan nilai data yang signifikan ini dibuktikan oleh adanya perbedaan yang signifikan antara nilai transaksi pembayaran kartu kredit dengan nominal

terendah yaitu Provinsi Bengkulu (Rp 28,63 Milyar) pada Triwulan IV 2021 dengan provinsi dengan nilai transaksi pembayaran kartu kredit tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara (Rp 4,26 Triliun) pada Triwulan IV 2021.

Pola berbeda ditunjukkan oleh nilai transaksi pembayaran pada kartu debit. Meskipun pandemi COVID19 menyebabkan dampak negatif pada perekonomian, namun nilai transaksi kartu debit justru cenderung mengalami peningkatan selama pandemi, meskipun sempat mengalami penurunan pada Triwulan II 2020. Pada Triwulan I 2020, nilai transaksi pembayaran dengan kartu debit di Sumatera tercatat sebesar Rp 255,63 Triliun. Angka ini kemudian meningkat sebesar 42,37% menjadi Rp 363,93 Triliun Pada Triwulan II 2022.

Nilai standar deviasi transaksi kartu debit di Sumatera selama pandemi tercatat lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variansi dan nilai rata-ratanya. Nilai transaksi dengan kartu debit terendah yang dicatatkan oleh Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 4,31 Triliun pada Triwulan III 2021, sementara itu Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan nilai transaksi kartu debit tertinggi di Sumatera selama pandemi yaitu mencapai Rp 97,7 Triliun pada Triwulan IV 2022.

Hasil deskripsi data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah di Sumatera di mana pada triwulan pertama pada tahun tertentu menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan berikutnya yang selalu meningkat, namun hal ini terjadi hanya di satu tahun periode. Misalnya pada tahun 2020, jumlah pengeluaran pemerintah pada Triwulan I tercatat sebesar Rp 51,09 Triliun, angka ini meningkat menjadi Rp 66,26 Triliun (Triwulan II), begitu seterusnya sampai Triwulan IV 2020. Pola ini juga terjadi pada periode 2021 dan setengah periode 2022. Adanya pola peningkatan yang “unik” ini menunjukkan bahwa Pandemi COVID19 tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Dengan kata lain, pandemi tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara.

Standar deviasi pengeluaran pemerintah selama pandemi tercatat selalu lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya sehingga mengindikasikan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai variansi dengan rata-ratanya. Nilai realisasi pengeluaran pemerintah terendah di Sumatera dicatatkan oleh Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 1,4 Triliun pada Triwulan I 2022, sementara Sumatera Utara menjadi provinsi dengan nilai realisasi pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu sebesar Rp 15,6 Triliun pada Triwulan IV 2021.

4.1.2 Hasil Uji Penentuan Model Estimasi

4.1.2.1 Hasil Uji Kesesuaian antara CEM dan FEM

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	df	Prob.
Cross-section F	274,347832	(9,84)	0,0000
Cross-section Chi-square	341,425873	9	0,0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai probability pada Cross-section Chi-square sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model yang sesuai antara CEM dan FEM adalah FEM. Dalam hal ini, uji kesesuaian model dapat dilanjutkan ke Uji Hausman untuk memilih model yang tepat antara FEM dan REM.

4.1.2.2 Hasil Uji Kesesuaian antara FEM dan REM

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	208,618003	6	0,0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Hasil Uji Hausman yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probability pada Cross-section random menunjukkan angka sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya, model yang sesuai untuk diterapkan dalam regresi data panel di dalam penelitian ini adalah FEM. Karena pada Uji Chow dan Uji Hausman sama-sama menunjukkan bahwa uji yang paling sesuai adalah FEM, maka untuk selanjutnya tidak perlu dilakukan Uji Lagrange Multiplier.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji Asumsi Klasik	Model FEM	Kriteria	Putusan
Uji Normalitas			
Probability	0,054975	P value > 5%	Lolos Uji Normalitas
Uji Heteroskedastisitas			
Prob. Chi-Square (6)	0,1585	P value > 5%	Lolos Uji Heterokedastisitas
Uji Autokorelasi			
Prob. Chi Square ² (<i>diperbaiki</i>)	0,6445	P value > 5%	Lolos Uji Autokorelasi
Uji Multikolinearitas			
Nilai Centered VIF			
LOG(P2PLENDING)	4,561934	Centered VIF < 10	Lolos Uji Multikolinearitas
LOG(CROWDFUNDING)	2,525588		
LOG(EMONEY)	5,371153		
LOG(DEBITCARD)	8,758288		
LOG(CREDITCARD)	4,155942		
LOG(KONSUMPEMERIN)	3,258536		

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tabel 6 di atas merupakan ringkasan dari hasil Uji Asumsi Klasik. Berdasarkan hasil Uji Normalitas, nilai probability tercatat sebesar $0,054975 > 5\%$. Hal ini bertanda bahwa data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Uji Heteroskedastisitas pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai Prob. Chi-Square (6) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1585 sehingga model regresi lolos dari uji heteroskedastisitas. Pada asumsi autokorelasi dengan metode

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sebelumnya model regresi mengalami masalah autokorelasi dengan nilai probability tercatat sebesar $0,0000 < 5\%$.

Pada penelitian ini, perbaikan autokorelasi dilakukan dengan pendekatan diferensi dengan cara memodifikasi persamaan model menjadi bentuk *first different* sesuai dengan pendapat (Basuki & Prawoto, 2017). Setelah dilakukan proses perbaikan, nilai Prob. Chi Square² tercatat sebesar $0,6445 > 5\%$ sehingga data lolos dari asumsi autokorelasi. Uji asumsi yang terakhir yaitu Uji Multikolinearitas. Pada uji ini, nilai Centered VIF dari semua variabel independen tercatat kurang 10, sehingga model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas. Meskipun demikian, terdapat satu variabel (LOG_DEB) yang memiliki nilai Centered VIF yang cukup tinggi yaitu 8,76, namun angka ini masih dapat ditoleransi.

4.1.3 Interpretasi Model yang Terbentuk

Tabel 7. Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11,09314	0,507474	21,85953	0,0000***
LOG(P2PLENDING)	0,040220	0,012180	3,302077	0,0014***
LOG(CROWDFUNDING)	0,003914	0,006883	0,568663	0,5711
LOG(EMONEY)	0,061311	0,014248	4,303145	0,0000***
LOG(DEBITCARD)	0,104987	0,034716	3,024127	0,0033***
LOG(CREDITCARD)	0,008806	0,016152	0,545173	0,5871
LOG(KONSUMSIPEMERINTAH)	0,031058	0,016985	1,828539	0,0710*

R-squared = 0,997282

Adjusted R-squared = 0,996797

Prob(F-statistic) = 0,000000

F-statistic = 2054,847

C : Konstanta

Variabel Dependen: LOG(PDRB ADHK)

Tingkat signifikansi : ***) prob < 1%; **) prob < 5%; *) prob < 10%

Sumber: Data sekunder diolah. 2022

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa model persamaan regresi yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM). Tabel 7 menjelaskan mengenai hasil regresi data panel dengan FEM. Interpretasi pertama dari hasil model yang terpilih yaitu dengan membentuk persamaan regresi. Berdasarkan hasil FEM pada Tabel 7, maka persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh *fintech p2p lending*, *crowdfunding*, *emoney*, *debit card*, *credit card*, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ADHK di Pulau Sumatera selama masa Pandemi COVID19 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 LOG(PDRB\ ADHK)_{i,t} = & 11.09314_{i,t} + 0.040220\ LOG(P2PLENDING)_{i,t} + \\
 & 0.003914\ LOG(CROWDFUNDING)_{i,t} + 0.061311\ LOG(EMONEY)_{i,t} + \\
 & 0.104987\ LOG(DEBITCARD)_{i,t} + 0.008806\ LOG(CREDITCARD)_{i,t} + \\
 & 0.031058\ LOG(KONSUMSIPEMERINTAH)_{i,t} + e_{i,t}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Berdasarkan hasil Persamaan (4), nilai koefisien regresi pada konstanta (C) tercatat sebesar 11,09314 dengan probability sebesar $0 < 1\%$, 5% , atau 10% . Hal ini berarti apabila semua variabel bebas bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel PDRB ADHK sebesar 11,09314. Dari hasil FEM dapat dilihat bahwa 4 dari 6 variabel independen yang diuji dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK ketika diuji secara parsial. Berdasarkan hasil FEM, nilai *probability* pada variabel LOG(P2PLENDING) tercatat sebesar $0,0014 < 0,01$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,040220. Hal ini berarti nilai transaksi *fintech p2p lending* selama pandemi COVID19 di wilayah Sumatera berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK. Dengan kata lain, jika nilai transaksi *fintech p2p lending* di wilayah Sumatera dapat ditingkatkan sebesar 1% saja, maka terjadi peningkatan PDRB ADHK sebesar 0,4022% di wilayah tersebut. Dengan demikian, hipotesis pertama dinyatakan **diterima**.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa nilai *probability* pada variabel LOG(CROWDFUNDING) tercatat sebesar $0,5711 > 1\%$, 5% , dan 10% . dengan koefisien regresi sebesar 0,003914. Hal ini menandakan bahwa *fintech crowdfunding* yang diukur dengan ada atau tidaknya transaksi penyaluran dana melalui *platform crowdfunding* selama pandemi di wilayah Sumatera berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB ADHK. Sehingga, dalam hal ini hipotesis kedua dinyatakan **ditolak**. Nilai *probability* variabel LOG(EMONEY) tercatat sebesar $0 < 1\%$, 5% , dan 10% dengan koefisien regresi sebesar 0,061311. Hasil ini bertanda bahwa variabel *fintech e-money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK. Dengan kalimat lain. setiap peningkatan transaksi *e-money* sebesar 1% selama masa pandemi COVID19 di wilayah Sumatera, maka dapat meningkatkan PDRB ADHK di wilayah tersebut sebesar 0,61311%. Dalam hal ini. hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**.

Hasil FEM menunjukkan bahwa variabel LOG(DEBITCARD) memiliki nilai *probability* sebesar $0,0033 < 1\%$, 5% , dan 10% dengan koefisien regresi 0,104987. Dengan demikian, variabel LOG(DEBITCARD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19 sehingga hipotesis keempat **diterima**. Jika nilai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu debit meningkat sebesar 1%, maka akan menaikkan angka PDRB ADHK sebesar 0,104987% di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19. Nilai *probability* pada variabel LOG(CREDITCARD) memperlihatkan angka sebesar 0,5871 atau lebih besar dari taraf signifikansi 10%, sehingga variabel LOG(CREDITCARD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19. Sementara itu, koefisien regresi pada variabel tersebut menunjukkan angka 0,008806 yang berarti variabel LOG(CREDITCARD)

berpengaruh positif terhadap PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19 meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dinyatakan **ditolak**.

Hasil uji t parsial yang terakhir menunjukkan bahwa variabel kontrol berupa LOG(KONSUMSIPEMERINTAH) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang tercatat sebesar $0,0710 < 10\%$ dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,031058. Dengan kata lain, apabila nilai transaksi pada jumlah konsumsi yang dikeluarkan pemerintah meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama Pandemi COVID19 sebesar 0,3058%.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Uji T Simultan, nilai F-Statistik tercatat sebesar 2054,847 dengan *probability* (F-statistik) sebesar $0 < 1\%$, 5%, dan 10%. Dengan demikian, variabel LOG (P2PLENDING), LOG (CROWDFUNDING), LOG (EMONEY), LOG (DEBITCARD), LOG (CREDITCARD), dan LOG (KONSUMSIPEMERINTAH) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK di wilayah Sumatera selama pandemi COVID19.

Terakhir, namun tidak kalah penting. Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* tercatat sebesar 0,996797 (dengan nilai R Square sebesar 0,997282). Hal ini berarti dalam model persamaan regresi yang telah dibentuk, variabel LOG (P2PLENDING), LOG (CROWDFUNDING), LOG (EMONEY), LOG (DEBITCARD), LOG (CREDITCARD), dan LOG (KONSUMSIPEMERINTAH) mampu menjelaskan variabel dependen LOG(PDRB ADHK) sebesar 99,6797%. sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Fintech Peer to Peer Lending* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selama Pandemi COVID19

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa *fintech peer to peer lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera selama 2,5 tahun terjadinya Pandemi COVID19. Dalam kalimat lain, semakin tinggi nilai transaksi pembiayaan yang disalurkan oleh *fintech p2p lending*, maka semakin meningkatkan PDRB di wilayah Sumatera. Jika nilai transaksi *p2p lending* di Sumatera ditingkatkan sebesar 1% saja, maka berdampak pada meningkatnya PDRB sebesar 0,4022%.

Ardiansyah (2019) menyebut bahwa hadirnya *fintech peer to peer lending* dapat menjadi solusi pendanaan bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang selama ini *unbaked* karena diharuskan memiliki agunan. Dalam hal ini, *fintech* memiliki kemampuan untuk

memperluas pangsa pasar UMKM dalam rangka mengatasi permasalahan modal karena semua transaksi pembiayaan yang dilakukan berbasis internet. Dengan segala kemudahan dalam proses pembiayaan yang dimiliki oleh *p2p lending*, maka pelaku usaha khususnya UMKM dapat memanfaatkan kemudahan layanan pendanaan yang ada untuk mendapatkan sumber pendanaan baru dalam rangka membiayai biaya produksi (Maulana & Wiharno, 2022). Dengan meningkatnya sumber dana yang berasal dari pembiayaan *p2p lending*, maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitas usahanya sehingga pada akhirnya berdampak pada meningkatnya PDRB. Lebih lanjut, dampak dari adanya penyaluran pembiayaan melalui *p2p lending* ini, maka dapat mendorong kenaikan pada pendapatan di semua sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.

Fisabilillah & Hanifa (2021) mengatakan bahwa situasi Pandemi COVID19 yang terjadi di Indonesia justru menjadi peluang “baru” bagi *fintech p2p lending* untuk semakin berkembang dan bahkan berpotensi menggantikan layanan pembiayaan konvensional seperti perbankan. Hal ini terjadi karena selama pandemi, sebagian besar perbankan konvensional memutuskan untuk mengurangi jumlahnya kepada pelaku usaha dan adanya fenomena meningkatnya inklusi keuangan digital. Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan (OJK) 2021, nilai penyaluran kredit perbankan konvensional selama satu tahun berlangsungnya Pandemi COVID19 menurun sebesar 2,1% (yoy) dibandingkan dengan periode sebelum COVID19. Di sisi lain, total nilai transaksi penyaluran pembiayaan melalui *p2p lending* justru meningkat pesat sebesar 115% (yoy) per Agustus 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Di wilayah Sumatera, nilai transaksi penyaluran pembiayaan dengan *p2p lending* telah mencapai lebih dari Rp 5 Triliun pada periode April-Juni 2022 atau meningkat hampir 5 kali lipat jika dibandingkan Januari-Maret 2020. Hal ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan *fintech p2p lending* dalam rangka mendapatkan pembiayaan semakin meningkat di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, kontribusi nilai penyaluran *p2p lending* di Sumatera terhadap nasional masih cenderung rendah yaitu hanya 9%. Sementara itu, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan kontribusi penyaluran pembiayaan *p2p lending* dengan proporsi terbesar yaitu mencapai 82%.

4.2.2 Pengaruh *Fintech Crowdfunding* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selama Pandemi COVID19

Hasil studi membuktikan bahwa nilai transaksi investasi yang dilakukan melalui *platform crowdfunding* berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PDRB di wilayah Sumatera selama pandemi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan *crowdfunding* di wilayah Sumatera selama pandemi belum cukup mampu untuk mendorong produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Secara teori, adanya peningkatan aktivitas investasi atau penanaman modal yang terjadi di suatu wilayah, seharusnya dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Dengan adanya peningkatan dalam faktor permodalan, maka pelaku usaha dapat membiayai biaya produksi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Saat ini, investasi tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dapat dilakukan dengan berbasis *platform*, seperti *crowdfunding* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan penggalangan dana dalam membiayai proyek usaha tertentu dengan berbasis internet (Moritz & Block, 2016). Namun, teori ini tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini.

Hal ini dapat terjadi karena meskipun *fintech crowdfunding* telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun sebagian besar penyaluran investasi yang selama ini dilakukan masih didominasi oleh wilayah Jawa yaitu mencapai lebih dari 95%, sementara sisanya di wilayah lain, termasuk di Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa *platform crowdfunding* belum menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat di Sumatera dalam mendapatkan permodalan. Data menyebutkan bahwa selama pandemi COVID19, nilai penyaluran investasi dengan *crowdfunding* di wilayah Sumatera cenderung masih rendah dan fluktuatif. Jika dibandingkan dengan skema pendanaan menggunakan *p2p lending*, nilai investasi *crowdfunding* masih jauh tertinggal dan bahkan terdapat 3 kuartal di mana tidak terjadi penyaluran investasi *crowdfunding* sama sekali di wilayah Sumatera.

Kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terhadap *crowdfunding* yang masih rendah merupakan alasan utama yang menyebabkan skema investasi dengan *crowdfunding* kurang diminati (Apriliani et al., 2019). Berkembangnya konsep pendanaan melalui *crowdfunding* di Indonesia seharusnya menjadi salah satu alternatif yang dapat menggairahkan perekonomian di Sumatera, namun saat ini masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha yang belum begitu mengenali konsep ini (Nugroho, 2019). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Disamping itu, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum menaruh kepercayaan penuh untuk berinvestasi di platform *crowdfunding* karena faktor risiko yang besar (Aprihasyati & Fitria, 2021).

4.2.3 Pengaruh *Fintech E-money* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selama Pandemi COVID19

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai transaksi pengeluaran masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan *fintech e-money* memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan PDRB di Sumatera selama pandemi. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan *e-money* untuk melakukan transaksi pembayaran dalam rangka memenuhi pengeluaran, maka semakin tinggi jumlah permintaan barang dan jasa sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi usahanya. Dengan kata lain, jika nilai transaksi *e-money* dapat ditingkatkan sebesar

1%, maka terjadi peningkatan pada PDRB sebesar 0,61311%.

Konsumsi dan pengeluaran yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu yang memengaruhi pertumbuhan PDRB. Semakin tinggi jumlah konsumsi yang dilakukan masyarakat, maka menandakan semakin banyak jumlah permintaan barang dan jasa yang memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitasnya (Ichvani & Sasana, 2019). Di era digital, kegiatan pengeluaran dan konsumsi masyarakat tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, namun juga dapat dilakukan dengan berbasis elektronik seperti penggunaan *e-money* (Al-Dmour et al., 2021). Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut.

Berkembangnya *e-money* telah mempromosikan inovasi teknologi finansial yang mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai (Omodero, 2021). Pengaturan tanpa uang tunai bukanlah skema keuangan dengan penghapusan uang keluar-masuk tetapi pengaturan ekonomi di mana barang dan jasa diperdagangkan melalui berbagai opsi pembayaran elektronik (Adeyemo et al., 2020). Ketersediaan layanan pembayaran secara *online* dengan *e-money* memberikan dorongan kepada individu untuk melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, satu alasan lainnya yang mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran dengan *e-money* adalah adanya potongan atau diskon. Saat ini, sudah banyak *merchant* yang memberikan potongan harga atau *cashback* apabila melakukan pembayaran dengan menggunakan *e-money*.

Segala keuntungan yang ditawarkan *e-money* ini semakin terasa ketika Pandemi COVID19 terjadi di Indonesia yang memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah. Sebagian besar masyarakat beralih dari pembayaran konvensional menuju pembayaran elektronik seperti *e-money* selama pandemi karena disamping alasan kesehatan, juga kemudahan. Data Bank Indonesia (BI) membuktikan bahwa nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp786.35 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat Rp281.39 triliun (55.73%) dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp504.96 triliun (Bank Indonesia, 2021). Adapun di wilayah Sumatera, transaksi dengan menggunakan *e-money* meningkat pesat sebesar 324% selama pandemi. Berkembangnya transaksi *cashless payment* dengan *e-money* di wilayah Sumatera selama pandemi mengindikasikan adanya kenaikan jumlah barang dan jasa yang diminta sehingga telah mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya (Khiewngamdee & Yan, 2019).

4.2.4 Pengaruh *Fintech Debit Card* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selama Pandemi COVID19

Hasil estimasi regresi membuktikan bahwa nilai transaksi dengan menggunakan kartu debit selama pandemi di Sumatera berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas konsumsi dan pengeluaran yang

dilakukan masyarakat dengan menggunakan kartu debit selama pandemi. Setiap peningkatan transaksi dengan kartu debit sebesar 1%, maka dapat menaikkan PDRB sebesar 0,105% di wilayah Sumatera selama pandemi.

Kartu debit merupakan salah satu alat pembayaran berbasis elektronik yang dikeluarkan bank yang berfungsi sebagai pengganti pembayaran secara tunai dengan mengacu pada saldo tabungan bank yang ada di rekening (Ramadani, 2016). Layanan kartu kredit mengharuskan adanya saldo tabungan yang mengendap di bank untuk melakukan transaksi. Dengan adanya fasilitas kartu debit ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran tanpa harus membawa uang. Selain praktis dan aman, fasilitas kartu debit juga tidak membebankan biaya administrasi yang tinggi yaitu hanya berkisar Rp 4.500 - Rp 8.500 per bulan tergantung jenis bank dan golongan kartu yang dimiliki. Adanya kemudahan yang ditawarkan dalam skema kartu debit ini turut mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat yang menjadi penanda terjadinya peningkatan produktivitas usaha (Zandi et al., 2013).

Sebelum munculnya sistem pembayaran dengan *e-money*, pembayaran elektronik berbasis kartu seperti kartu debit telah terlebih dahulu berkembang dan digunakan oleh masyarakat. Di wilayah Sumatera, transaksi dengan menggunakan kartu debit telah mencapai lebih dari Rp 360 Triliun pada periode April-Juni 2022. Nilai transaksi ini bahkan tidak mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi, bahkan justru cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas masyarakat dalam membelanjakan uang dengan menggunakan kartu debit.

4.2.5 Pengaruh *Fintech Credit Card* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera selama Pandemi COVID19

Hasil riset memperlihatkan bahwa nilai transaksi kartu kredit selama pandemi di Sumatera berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PDRB. Dengan kata lain, nilai transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit tidak mampu mendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang menjadi indikator dalam peningkatan PDRB. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dugaan awal yang memprediksi bahwa nilai transaksi kartu kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Selain kartu debit, satu fasilitas pembayaran berbasis elektronik lainnya yang disediakan perbankan adalah kartu kredit. Meski sama-sama dikeluarkan oleh perbankan, namun tentu saja kedua alat pembayaran elektronik ini memiliki fungsi dan skema yang berbeda. Berbeda dengan kartu debit di mana nasabah harus memiliki tabungan di bank, kartu kredit merupakan salah satu instrumen utang yang memuat pinjaman yang harus dikembalikan ke bank dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti ketika masyarakat menggunakan kartu kredit maka transaksi yang dilakukan akan dibayarkan oleh pihak terlebih dahulu, kemudian nasabah harus

mengembalikan pinjaman beserta bunganya ke bank di akhir bulan (Wong & Tang, 2020).

Kemudahan dalam fasilitas kartu kredit menjadi sangat bermanfaat apabila nasabah dapat menggunakannya secara bijak, namun bagi mereka yang tidak cakap dalam menggunakan kartu kredit maka dapat berdampak negatif. Sebagian besar penggunaan kartu kredit adalah untuk keperluan konsumtif yaitu membeli barang tertentu sesuai dengan kebutuhan (Ekici & Dunn, 2010). Semakin tinggi aktivitas konsumsi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit seharusnya dapat meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa yang menjadi ciri peningkatan PDB, namun penelitian ini menolak teori tersebut.

Meskipun fasilitas kartu kredit menawarkan berbagai macam kemudahan dalam transaksi pembayaran, namun skema yang diterapkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif.. Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit di wilayah Sumatera cenderung mengalami penurunan selama pandemi. Hal ini menyiratkan bahwa sebagian besar masyarakat di Sumatera akan berfikir berulang kali dalam melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, bukan produktif, terlebih di situasi pandemi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun (Hanoatubun, 2020). Selain faktor tersebut, adanya biaya bunga yang tinggi juga menjadi alasan lainnya mengapa sebagian besar masyarakat di Sumatera memutuskan untuk mengurangi jumlah konsumsinya dengan menggunakan kartu kredit selama pandemi (Malelak et al., 2018).

V. KESIMPULAN. IMPLIKASI. SARAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berkembangnya teknologi finansial di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera telah mendorong aktivitas konsumsi dan investasi masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Fenomena ini diperkuat oleh adanya Pandemi COVID19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Adanya kemudahan dan kecepatan transaksi pembayaran, investasi, dan pembiayaan yang ditawarkan *fintech* berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari lima jenis *fintech* yaitu *peer to peer lending*, *e-money*, dan *debit card* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatera selama pandemi. Jika terjadi peningkatan transaksi sebesar 1% pada tiga jenis *fintech* tersebut, maka berkontribusi terhadap peningkatan PDRB masing-masing sebesar 0,402%, 0,613%, dan 0,105%

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sudah banyak masyarakat di Pulau Sumatera yang telah memanfaatkan teknologi keuangan dalam rangka mendukung aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Adanya peningkatan nilai transaksi *fintech* mengindikasikan bahwa teknologi finansial ini berpotensi untuk menggantikan keuangan

konvensional di masa depan. Selain itu, *fintech* juga dapat menjadi instrumen keuangan lain bagi negara dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di situasi yang sulit seperti pandemi.

5.2 Implikasi

Penelitian ini berimplikasi pada teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa dua dari tiga faktor penentu pertumbuhan ekonomi dalam sistem perekonomian tertutup dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi dan investasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pandangan terhadap teori bahwa aktivitas konsumsi dan investasi yang memengaruhi penerimaan agregat tidak hanya terjadi pada sistem ekonomi yang terjadi secara “nyata”. Hadirnya *fintech* yang dilandasi teknologi informasi di dalam sistem perekonomian turut mendorong meningkatnya aktivitas konsumsi dan investasi yang menjadi kunci pertumbuhan. Implikasi praktis dari penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian di mana berkembangnya *fintech* bukan hanya sekadar lahirnya inovasi dari teknologi finansial, namun juga tentang bagaimana agar seluruh pemangku kebijakan dapat mendorong potensi *fintech* agar berkontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas keuangan masyarakat.

5.3 Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang diusulkan kepada pihak terkait pengembangan *fintech* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu membuat regulasi yang mengatur mengenai skema pembiayaan yang mendorong pada meningkatnya transaksi pembiayaan berbasis *fintech p2p lending* ke arah produktif daripada konsumtif. Di samping itu, OJK juga perlu memprioritaskan akses permodalan *p2p lending* bagi pelaku usaha yang berada di pedesaan yang selama ini tidak terjangkau oleh bank.
2. Pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kementerian UKM dan Koperasi harus gencar dalam melakukan sosialisasi terkait *fintech* khususnya pendanaan *crowdfunding* yang selama ini hanya terfokus di Pulau Jawa. Dengan meningkatnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, maka dapat berdampak pada pengetahuan dan minat masyarakat dalam menggunakan platform *fintech*.
3. Bank Indonesia (BI) perlu untuk menetapkan suku bunga acuan *fintech* yang kompetitif. Suku bunga kredit yang terlalu tinggi akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga pelaku usaha khususnya UMKM akan berfikir dua kali dalam melakukan pembiayaan dengan *fintech*.
4. Selain didorong untuk terus meningkatkan kualitas tampilan *platform*, perusahaan *fintech* juga disarankan untuk terus berinovasi dalam hal layanan seperti menyediakan potongan harga, game berbasis *reward*, *cashback*, dan lain-lain. Adanya inovasi ini akan meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan *fintech*.

5. Dalam rangka meningkatkan aktivitas *cashless payment* di wilayah Sumatera, pemerintah daerah dapat menerapkan “gerakan transaksi non tunai” di setiap fasilitas umum yang ada misalnya mewajibkan membayar tiket bis kota dengan *e-payment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemo, K., Isiauwe, D., Adetula, D., Olusanmi, O., & Owolabi, F. (2020). Mandatory adoption of the Central Bank of Nigeria’s cashless and e-payment. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 243-253.
- Alber, N., & Dabour, M. (2020). The dynamic relationship between FinTech and social distancing under COVID-19 pandemic: Digital payments evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 12(11).
- Al-Dmour, A., Al-Dmour, H., Al-Barghuthi, R., Al-Dmour, R., & Alshurideh, M. T. (2021). factors influencing the adoption of e-payment during pandemic outbreak (COVID-19): Empirical evidence. In *The Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) on Business Intelligence*, (pp. 133-154). Springer, Cham.
- Andaiyani, S. Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85-92.
- Aprihasyyati, D. A., & Fitria, S. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Management*, 9(2).
- Apriliansi, R., Ayunda, A., & Fathurochman, S. F. (2019). Kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil terhadap crowdfunding syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 267-389.
- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158-166.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/171/534/1/-seri-2010-1-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran.html>
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di kota Ambon. *Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Deng, X. H., & Cheng, X. (2019). FinTech and sustainable development: Evidence from China based on P2P data. *Sustainability*, 11(22), 6434.
- Ekici, T., & Dunn, L. (2010). Credit card debt and consumption: evidence from household-level data. *Applied Economics*, 42(4), 455-462.
- Fisabilillah, L. W., & Hanifa, N. (2021). Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP*

- (*Riset Ekonomi Pembangunan*), 4(1), 61-72.
- Khiewngamdee, C., & Yan, H. D. (2019). The role of Fintech e-payment on APEC economic development. *In Journal of Physics: Conference Series*, (Vol. 1324, No. 1, p. 012099). IOP Publishing.
- Malelak, M. I., Memarista, G., & Anastasia, N. (2018). Pengaruh faktor demografi terhadap perilaku penggunaan kartu kredit. *Jurnal Inovasi & Bisnis (Inovbiz)*, 4(2), 172-188.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of macroeconomics*. Cengage Learning.
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1).
- Moritz, A., & Block, J. H. (2016). Crowdfunding: A literature review and research directions. *Crowdfunding in Europe*, 25-53.
- Nachrowi, D. N., & Usman., H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Narastri, M. (2020). Financial technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155-170.
- Narayan, S. W. (2014). Does fintech matter for Indonesia's economic growth? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4), 437-456.
- Nugroho, A. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesi. 36.
- Omodero, C. O. (2021). Fintech innovation in the financial sector: Influence of e-money products on a growing economy. *Studia Universitatis Vasile Goldiş Arad, Seria Ştiinţe Economice*, 31(4), 40-53.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Fintech Lending*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
- Pangestika, S. (2017). *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pratama, M. A. (2021). Pengendalian Inflasi yang Berbasis Finansial Teknologi (Fintech), Inklusi Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial di D-8 Negara Berkembang. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(2).
- Rahardjo, B., Ikhwan, K., & Siharis, A. K. (2019). Pengaruh financial technology (fintech) terhadap perkembangan UMKM di Kota Magelang. *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*.
- Ramadani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 1-8.
- Ratna, S. W. (2021). Pengaruh transaksi financial technology terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2010-2020. *Doctoral dissertation, Universitas Internasional Semen Indonesia*.
- Retnosari, R., Khotijah, S. A., & Panggiarti, E. K. (2020). Peran Financial Technology Lending sebagai Keuangan Inklusi Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 130-138.
- Rosser, J. B. (2013). *From catastrophe to chaos: a general theory of economic discontinuities*. Springer Science & Business Media.
- Sadigov, S., Vasilyeva, T., & Rubanov, P. (2020). Fintech in economic growth: Cross-country analysis. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 729-739.
- Sihombing, R. (2021). Analisis pengaruh financial technology terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Simorangkir, C., Prasetya, M. A., & Purwadi, Y. K. (2021). The Role of Fintech As East Java's Economic Growth Drivers: An Empirical Analysis of The Sollow Economic Growth Model. *East Java Economic Journal*, 5(2), 150-169.
- Song, N., & Appiah-Otoo, I. (2022). The Impact of Fintech on Economic Growth: Evidence from China. *Sustainability*, 14(10), 6211.
- Sriyana, J. (2015). *Metode Regresi Data Panel: Dilengkapi Analisis Kinerja Bank*. Yogyakarta:

Ekonomia, FE UII.

- Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 81-91.
- Terra, F. H., Ferrari Filho, F., & Fonseca, P. C. (2021). Keynes on state and economic development. *Review of Political Economy*, 33(1), 88-102.
- United Overseas Bank (UOB), PwC, Singapore Fintech Association (SFA). (2021). *FinTech in ASEAN 2021: Digital takes flight*. Singapore: UOBgroup.
- Widiastuti, A., & Silfiana, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(1), 97-107.
- Wong, Z. J., & Tang, T. C. (2020). Credit card usage and inflation: A case study of a small open economy. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(1), 19-32.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.
- Zandi, M., Singh, V., & Irving, J. (2013). The impact of electronic payments on economic growth. *Moody's Analytics: Economic and Consumer Credit Analytics*, 217(2).